

2025



DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Renja PD berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam rangka menuju good governance yang tercermin dalam visi Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangannya untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang.

Semoga Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2025 ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan program kerja khususnya di bidang perikanan.

Liwa, April 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Kamaludin, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19660405 198903 1 007

5. Subegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA -SKPD realisasi fisik/output sebesar 27,36 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
6. Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
7. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
8. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
9. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI**

I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I	10
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
IV. PENUTUP	24

**LAMPIRAN I
LAMPIRAN II**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari Good Governance, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perikanan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat yang telah disusun.

Perikanan merupakan salah satu sektor prospektif dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Potensi Perikanan ini tersebar di 15 kecamatan yang terdiri atas 3 bidang pokok yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Oleh karena itu, program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program kelautan dan perikanan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan;
- c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar pertimbangan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang menjabarkan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat dan sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025.

Tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah :

1. Menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan pembangunan yang tertuang dalam dokumen yang terpadu, terarah dan partisipatif dalam pembangunan;
2. Menetapkan indikator kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja OPD agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan

hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;

3. Sebagai salah satu indikator dalam evaluasi kinerja aparatur Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Perikanan Kabupaten Lampung Barat;
4. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat.

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I

Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya produksi perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	1,5%

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 5 (lima) program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan dan jumlah subkegiatan termasuk subkegiatan rutin sebanyak 48 (empat puluh delapan) Subkegiatan. Alokasi dana tahun 2025 untuk Belanja sebesar Rp. 4.745.873.145,- (Empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) teralisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 925.744.573,- atau 19,51 Persen.

Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 48 Subkegiatan realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum dapat mencapai 100 persen yaitu sebagai berikut :

1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi fisik/output sebesar 4,07 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
2. Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA -SKPD realisasi fisik/output sebesar 22,30 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
3. Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA -SKPD realisasi fisik/output sebesar 25,84 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
4. Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA -SKPD realisasi fisik/output sebesar 25,82 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

5. Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA -SKPD realisasi fisik/output sebesar 27,36 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
6. Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
7. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
8. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
9. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

10. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan dan analisi prognosis realisasi anggaran realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
11. Subkegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan BMD SKPD realisasi fisik/output sebesar 2 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
12. Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai realisasi fisik/output sebesar 2 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
13. Subkegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
14. Subkegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor realisasi fisik/output sebesar 6 Persen Realisasi fisik/output

tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

15. Subkegiatan Penyediaan dan peralatan perlengkapan kantor realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
16. Subkegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan realisasi fisik/output sebesar 16,16 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
17. Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan realisasi fisik/output sebesar 25,00 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
18. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi fisik/output sebesar 12,85 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
19. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100

persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

20. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi fisik/output sebesar 25 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
21. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik realisasi fisik/output sebesar 15,82 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
22. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi fisik/output sebesar 10,18 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
23. Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas opsional/lapangan realisasi fisik/output sebesar 37 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
24. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi fisik/output sebesar 18,22 Persen

Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

25. Subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya keterlambatan dalam proses pencairan anggaran;

26. Subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya keterlambatan dalam proses pencairan anggaran;

27. Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan realisasi fisik/output sebesar 7,41 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

28. Subkegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap realisasi fisik/output sebesar 7,86 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

29. Subkegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
30. Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
31. Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil realisasi fisik/output sebesar 29.09 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
32. Subkegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing realisasi fisik/output sebesar 19,66 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

33. Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
34. Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
35. Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
36. Subkegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;
37. Subkegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu)

Daerah Kabupaten/Kota realisasi fisik/output sebesar 0 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

38. Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi fisik/output sebesar 4,78 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

39. Subkegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi fisik/output sebesar 3,02 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

40. Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi fisik/output sebesar 3,82 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

41. Subkegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi fisik/output sebesar 0

Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

42. Subkegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat realisasi fisik/output sebesar 4,94 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

43. Subkegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota realisasi fisik/output sebesar 2,87 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

44. Subkegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota realisasi fisik/output sebesar 12,62 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

45. Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi fisik/output sebesar 7,63 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

46. Subkegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil realisasi fisik/output sebesar 4,94 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

47. Subkegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi fisik/output sebesar 3,86 Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun;

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat telah menyusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran belanja pada RKPD/Renja Murni Tahun 2025

Dinas Perikanan merencanakan sebanyak 5 Program dengan besaran anggaran Rp. 6.089.741.450,-

2. Jumlah anggaran belanja pada APBD Murni Tahun 2023

Dinas Perikanan pada tahun 2025 pada APBD murni melaksanakan 5 program, 17 Kegiatan dan 47 subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.745.873.145,-

3. Jumlah subkegiatan yang bertambah pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025

Pada saat Renja Perubahan terdapat 1 Subkegiatan yang bertambah pagunya dibandingkan APBD Murni pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat;

4. Jumlah Subkegiatan yang berkurang pagunya pada Renja Perubahan Tahun 2023 dibandingkan APBD Murni.

Terdapat 26 Sub kegiatan yang berkurangnya pagunya pada Renja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat;

5. Jumlah Subkegiatan yang baru muncul pada Renja Perubahan Tahun 2025 dibandingkan APBD Murni.

Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tidak ada subkegiatan baru yang muncul pada Renja Perubahan Tahun 2025;

6. Jumlah Subkegiatan yang dihilangkan pada Renja Perubahan Tahun 2025 dibandingkan APBD Murni.

Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Terdapat 2 Subkegiatan yang dihilangkan pada Renja Perubahan Tahun 2025.

**BAB IV.
PENUTUP**

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas serta dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Keberadaan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, teknologi dan potensi pendukung lainnya yang tersedia di Kabupaten Lampung Barat, harus dapat diformulasikan secara tepat guna dan berhasil guna dalam pemenuhan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga kontribusi positif yang cukup signifikan terhadap keberhasilan upaya pembangunan masyarakat berimplikasi pada percepatan pembangunan perikanan di Kabupaten Lampung Barat yang optimal.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025 diharapkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2025 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan pusat dan provinsi dan juga dengan para -

stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan perikanan.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lampung Barat,



Kamaludin, ST
Pembina, Utama Muda
NIP. 19660405 198903 1 007

LAMPIRAN – LAMPIRAN

KODE	2	3	4	5	6	Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	4	5	6	7	8=7/6	9=5+7	10=9/4
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan	80%		79,98 %	-	-		
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran daerah yang disusun	25 Dokumen	49 Dokumen	28 Dokumen	1 Dokumen	3,6	50 Dokumen	200%
3	Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	19 Dokumen	8 Dokumen	1 Dokumen	12%	20 Dokumen	250%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	0%		0%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	0%		0%
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	0%		0%
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	0%		0%

3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	4 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25%	9 Dokumen	225%
3	25	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%	27 Laporan	225%
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	-	0%		0%
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	5 Unit	8 Unit	3 Unit	3 Unit			
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	7 Unit	-	0%		0%
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5 Unit	3 Unit	-	0%		0%
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan				
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%	27 Laporan	225%
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%	27 Laporan	225%
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%	27 Laporan	225%
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	27 Unit	27 Unit	27 Unit				

3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	300%
3	25	01	2.05	0005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen 3 orang	0%		
3	25	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2 Dokumen	-	0%		0%
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	0%		0%
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang undangan jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disiapkan Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah paket peralatan dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	36 Sub Organisasi	4 dokumen 12 Laporan 12 Laporan 2 paket 1 Paket 2 Paket			
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	1 Paket	100%	3 Paket	300%
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	50%	3 Paket	150%

3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	3 Unit	2 Unit	-	0%	0%
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	64 unit	1 Dokumen	-	0%	0%
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit	1 Dokumen	43 Unit	-	0%	0%
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	45 Orang/Unit	45 Orang	34 Orang Unit	-	0%	0%
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	10%		10 %			
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kab/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	0%	0%
3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	2 Dokumen	1 Dokumen	33 Pelaku Usaha	-	0%	0%
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan	40 Pelaku Usaha	1 Dokumen	40 Pelaku Usaha	-	0%	0%
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	3%		10 %			

3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	38 Unit	19 Unit	3 Unit	15,80%	41 Unit	215,78%
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9 Unit	5 Unit	1 Unit	20%	10 Unit	200%
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9 Unit	3 Unit	-	0%		0%
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,60%		1,5 %				
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	15 Lokasi	78 lokasi	5 Dokumen 2 Unit 60 Unit	-	0%		
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	0%		0%
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	8 Unit	5 Unit	2 Unit	-	0%		0%
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	120 Unit	50 Unit	60 Unit	-	0%		0%
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelnbagaannya Jumlah Nelayan Kecil yang	6 Kali	410 Orang	12 Kelompok 60 Orang				

3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	90 Orang	345 Orang	60 Orang	-	0%	0%
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	9 kelompok	15 Kelompok	12 Kelompok	-	0%	0%
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3 unit Usaha	0 Rekomendasi	3 Unit Usaha	-	0%	0%
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	30 Rekomendasi	0 Rekomendasi	5 Rekomendasi	-	0%	0%
3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	30 Rekomendasi	0 Rekomendasi	5 Rekomendasi	-	0%	0%
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,60%		1,5 %			
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	10 Rekomendasi	0 Rekomendasi	30 Rekomendasi			
3	25	04	2.01	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	25 Rekomendasi	30 Rekomendasi	-	0%	0%

3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang mengikuti sosialisasi, pembinaan dan pelatihan	4 kali	34 Kelompok	14 kelompok				
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	40 Kelompok	4 Kelompok	-	0%		0%
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	2 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	-	0%		0%
3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	2 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	-	0%		0%
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2 Kelompok	27 Kelompok	2 Kelompok	-	0%		0%
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)	100 Rekomendasi	550 Rekomendasi	550 Rekomendasi				
3	25	04	2.03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Rekomendasi	550 Rekomendasi	550 Rekomendasi	-	0%		0%
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	15 Kecamatan	15 Lokasi	15 Kecamatan				
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20 Dokumen	4 Dokumen Dokumen	2 Dokumen	50%	22 Dokumen	2200%

3	25	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	0%	0%
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	5 Dokumen	0%	0%
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala	15 Unit Usaha	2 Unit Usaha	15 Unit Usaha	0%
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala	15 Unit Usaha	115 Unit Usaha	15 Unit Usaha	0%
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	10 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	0%
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	10 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	0%



No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kategori Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Pemangku Jabab
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Renja Murni	APBD Murni	Perubahan Renja	Renja Murni	APBD Murni	Perubahan Renja			Nasional	Daerah				
3	2	Dinas Perikanan			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN PELUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN															7.580.374.750	
3	25	PROGRAM PENGUNCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															7.580.374.750	
3	25	01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAJIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan	Nilai SAJIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan	79,98 %	79,98 %	79,98 %	3.498.871.450	3.678.978.645	3.421.909.975						79,98 %	4.926.250.250	
3	25	01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	5 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	87.277.400	60.612.000	45.548.000						-	93.662.750	
3	25	01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	40.421.400	29.246.000	14.182.000	Kab. Lampung Barat, Bukit Way Mengabu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					44.464.000	DINAS PERIKANAN
3	25	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.926.000	4.926.000	4.926.000	Kab. Lampung Barat, Bukit Way Mengabu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					5.209.000	DINAS PERIKANAN
3	25	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.410.000	4.395.000	4.395.000	Kab. Lampung Barat, Bukit Way Mengabu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					4.630.500	DINAS PERIKANAN
3	25	02 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																


3	Z5	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.410.000	4.390.000	4.390.000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	4.630.560 DINAS PERIKANAN	
3	Z5	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	24.255.000	8.890.000	8.890.000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku Kab. Lampung Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor	25.467.750 DINAS PERIKANAN	
3	Z5	01	2.02	0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan	2 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 27 Orang/14 bulan	2 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 27 Orang/14 bulan	2.573.203.300	2.934.088.475	2.934.088.475			Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	3.824.921.375	
3	Z5	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.561.075.900	2.922.081.075	2.922.081.075	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor	3.802.187.560 DINAS PERIKANAN	
3	Z5	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.410.000	4.360.000	4.360.000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor	4.630.500 DINAS PERIKANAN	
3	Z5	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

3	25	01	2.02	0000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triliunans/Per	2 Dokumen	3.107.400	3.252.400	3.252.400	3.252.400	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nilai tambah	3.472.872	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.03	0001	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran	2 Dokumen	8.390.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nilai tambah	9.229.000	Aparatur
3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.390.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nilai tambah	9.229.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.05	0000	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen monitoring evaluasi pegawai	1 Dokumen	35.755.000	35.740.000	35.740.000	19.875.000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nilai tambah	37.860.500	Aparatur
3	25	01	2.05	0000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20.755.000	20.740.000	20.740.000	19.875.000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nilai tambah	22.830.500	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nilai tambah	15.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang undangan fasilitasi kunjungan tamu jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	4 dokumen 12 Laporan 12 Laporan 2 paket 1 Paket 2 Paket	261.005.500	172.485.600	172.485.600	50.885.600	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	284.078.625	Aparatur
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Utus/Penerangan Bangunan Kantor										

3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	39.690.000	24.616.600	24.616.600	24.616.600	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan nilai tambah	41.674.500	DINAS PERIKAMAN
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	7.080.000	6.480.000	6.480.000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan	7.380.000	DINAS PERIKAMAN	
3	25	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.599.000	8.491.000	8.491.000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan	6.900.000	DINAS PERIKAMAN	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	202.124.000	7.053.000	128.653.000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan	222.336.000	DINAS PERIKAMAN	
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	42.300.000	4.800.000	4.800.000	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan	45.530.000	DINAS PERIKAMAN	
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan	10.000.000	DINAS PERIKAMAN	
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	32.300.000	4.800.000	4.800.000	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan	35.530.000	DINAS PERIKAMAN	
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	177.260.000	144.221.900	144.221.900	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan	178.000.000	DINAS PERIKAMAN	
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	177.260.000	144.221.900	144.221.900	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan	178.000.000	DINAS PERIKAMAN	

No	25	08	2.01	0004	Pembentukan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	60 Unit	60 Unit	60 Unit	231.000.000	76.000.000	61.850.000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat Nelayan	254.100.000 DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02	0001	Pembinaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Penguatannya	12 Kelompok 60 Orang	12 Kelompok 60 Orang	12 Kelompok 60 Orang	179.025.000	138.872.000	95.616.000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat Nelayan	196.927.500
3	25	08	2.02	0001	Penguatannya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	60 Orang	60 Orang	57.750.000	89.369.000	40.113.000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat Nelayan	63.525.000 DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Penguatannya Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Penguatannya	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	57.750.000	49.503.000	55.503.000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat Nelayan	63.525.000 DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Penguatannya, Bantuan Pembinaan, dan Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembinaan, dan Kemitraan Usaha	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	63.525.000	-	-	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat Nelayan	63.525.000 DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.04	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sural, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dausahkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	57.750.000	-	-	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat Nelayan	63.525.000
3	25	03	2.04	0002	Pelaksanaan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	57.750.000	-	-	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat Nelayan	63.525.000 DINAS PERIKANAN
189	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,5 %	1,5 %	1,5 %	978.285.000	517.336.000	359.347.300	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat Nelayan	866.481.000
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	63.525.000	22.000.000	8.600.000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat Pembudidaya Ikan	69.877.500

No. Urut	Kategori Usaha	Jumlah Pemilik Usaha	Jumlah Pemilik Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pemilik Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	7 Pemilik Usaha	7 Pemilik Usaha	7 Pemilik Usaha	329.175.000	44.768.000	53.723.000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Mel/Desa	INSURANCE FISCAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor	Pemerintah


 Kepala Dinas Perikanan

 KAWALIDIN, ST
 NIP. 195604031989031007